

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi mengenai keadaan perusahaan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak. Syafri (2008, hlm. 7) menyatakan bahwa laporan keuangan digunakan oleh pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor, kreditur atau banker, pemerintah dan regulator, serta untuk analisis, akademis, dan pusat data bisnis. Maka pengguna informasi dari laporan keuangan dapat dipisahkan ke dalam dua kelompok, yakni pihak internal dan eksternal perusahaan.

Manajer sebagai pihak internal yang menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam kegiatan operasional, serta sebagai alat untuk menyampaikan keadaan perusahaan kepada pemegang saham. Sementara pemegang saham sebagai pihak eksternal, membutuhkan laporan keuangan untuk memantau pertanggungjawaban manajemen atas kinerjanya, untuk menilai hasil yang telah dicapai perusahaan, dan untuk menaksir jumlah dividen yang bisa diperolehnya dalam periode bersangkutan.

Hubungan antara manajer dan pemegang saham ini dapat dijelaskan melalui teori agensi. Dalam hubungan keagenan pemegang saham (prinsipal) memberikan kewenangan kepada manajer (agen) untuk mengelola perusahaan demi kepentingannya. Namun Jensen et al, (1976) mengasumsikan prinsipal dan agen cenderung memaksimalkan kesejahteraannya masing-masing sehingga ada kemungkinan jika agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal).

Rahmah et al, (2014) menyatakan para pengguna internal (manajemen) memiliki kontak langsung dengan perusahaan dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal (pemegang saham/pemilik). Hal ini menyebabkan terjadi asimetri informasi. Ketika asimetri informasi tinggi,

pemegang saham (prinsipal) tidak memiliki sumber daya yang cukup, intensif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajer, di mana hal ini memberikan kesempatan atas praktik rekayasa keuangan (Rahmah et al, 2014). Proses audit laporan keuangan dianggap dapat mengurangi asimetri informasi dalam perusahaan.

Meutia (2004) dalam (Wiryadi et al, 2013) menyatakan audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Audit perlu dilakukan oleh pihak yang independen karena: (a) adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan menyebabkan perlunya pihak ketiga yang dapat dipercaya, (b) laporan keuangan ada kemungkinan mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, (c) laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini *unqualified*, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (Yendrawati, 2007).

Setelah proses audit atas laporan keuangan dilaksanakan, perusahaan berkewajiban untuk membalas jasa akuntan publik dengan memberikan *fee* audit. Masalah *fee* adalah suatu permasalahan yang dilematis karena auditor mendapat *fee* dari perusahaan (klien) yang diaudit, di mana di satu sisi auditor harus independen memberikan opininya tapi di sisi lain auditor juga memperoleh imbalan dari klien atas pekerjaan yang dilakukannya (N. Herawaty, 2011). Belum adanya standar penetapan *fee* audit secara baku menyebabkan seringkali terjadi *abnormal fee* audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

Abnormal audit fee adalah selisih antara audit *fee* yang benar-benar dibayarkan kepada auditor (untuk audit laporan keuangan tahunan) dengan ekspektasi audit *fee* yang normal yang seharusnya dikenakan untuk perikatan audit tersebut (Choi et al,2010). *Abnormal audit fee* dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap kualitas audit. Hoitash et al,(2007) (dalam Fitriany et al, 2008) menyatakan apabila *fee* audit yang dibayarkan kepada auditor besar

maka dapat menyebabkan peningkatan kualitas audit karena upaya yang dilakukan auditor meningkat, namun di sisi lain *fee* audit yang terlalu besar dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada klien.

Salah satu kasus *abnormal audit fee* terjadi dalam kasus *fraud* laporan keuangan Satyam (2008). *Fraud* Satyam ini melibatkan *Price Waterhouse Coopers* (PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah mengaudit Satyam selama delapan tahun terakhir. Jacob et al,(2015) menyatakan PwC mendapatkan tambahan *fee* audit sebanyak tiga kali lipat dalam periode *fraud* ini terjadi. Hal tersebut mengindikasikan terdapatnya *fee* audit yang bersifat *abnormal* selama *fraud* Satyam.

Sementara ancaman *abnormal fee* audit yang dihadapi auditor Indonesia tergambar dari peraturan penentuan *fee* audit yang diatur dalam Surat Keputusan No.KEP.024/IAPI.VII/2008 yang memuat panduan bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam menetapkan besaran *fee* audit yang wajar sesuai atas jasa profesionalnya. Dalam salah satu artikel Akuntan Online (2013) dinyatakan besaran *fee* audit terhadap jasa akuntan publik (AP) dalam praktek di lapangan lebih banyak hasil tawar menawar antara KAP (kantor akuntan publik) dengan calon auditeenya, sehingga berakibat pada penurunan *fee* audit dan juga berdampak pada ruang lingkup audit. Hal ini menunjukkan terjadinya penerapan *fee* audit di bawah standar minimal oleh KAP di Indonesia, sehingga IAPI merasa perlu melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Melalui *website* resminya, IAPI menyatakan akan segera melakukan revisi terhadap kebijakan penentuan *fee* audit. Program *review* mutu dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong *fee* audit yang *reasonable* dan bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk memastikan anggota tidak menerapkan *fee* audit rendah yang berisiko tinggi (IAPI, 2016).

Kompleksitas jasa audit merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besaran *fee* audit. Tingkat kesulitan (*task difficulty*) dan variabilitas tugas (*task variability*) audit yang semakin tinggi menjadikan pekerjaan audit semakin kompleks (Jemada et al, 2013). Salah satu kompleksitas tugas auditor dalam pengumpulan bukti audit adalah melakukan pengujian fisik atas aset. Apandi (2015) menyatakan dalam perspektif *client attribute* jumlah

asset perusahaan merupakan salah satu faktor yang dinilai paling mempengaruhi besarnya *fee* audit. *Non current asset* (aktiva tidak lancar) merupakan salah satu akun yang seringkali menunjukkan jumlah material dalam laporan keuangan sebagian besar entitas, sehingga memiliki kerumitan tersendiri dalam proses auditnya.

Dalam IFRS 13 *Fair value Measurement* diatur ketentuan bahwa aset dinilai menggunakan harga wajar (*fair value*). Penerapan *fair value* memiliki sisi positif dan negatif yang masih diperdebatkan. Hidayat (2012) berpendapat *fair value* dianggap memiliki relevansi nilai jika peningkatan nilai wajar aset bersih diikuti dengan peningkatan nilai saham, atau sebaliknya. Penelitian Herrmann et al, (2006) menyatakan bahwa *fair value* untuk *property, plant, dan equipment* lebih relevan bagi para pengambil keputusan. Sebaliknya, Watts (2006) menyatakan bahwa pengukuran dengan menggunakan *fair value* merupakan subyek manipulasi karena merupakan alat ukur yang lemah terhadap penilaian dan kinerja dibandingkan dengan penggunaan nilai historis. Sementara Lee et al, (2013) menyatakan bahwa menggunakan penilaian dan subjektivitas dalam memperkirakan *fair value* dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan secara signifikan karena dapat mengarahkan pada ketidakpastian, sehingga terdapat perbedaan yang material antara perkiraan dengan hasil aktual.

Berbeda dengan biaya historis (*historical cost*) yang menggunakan nilai ketika pembelian, memperoleh *fair value* untuk aset tetap tidaklah mudah. Dalam penerapannya *fair value* membutuhkan banyak estimasi, asumsi dan *judgment*. Auditor harus melakukan evaluasi penggunaan estimasi, asumsi dan *judgment* yang dilakukan manajemen secara rasional serta menentukan konsistensi pengukuran dalam penggunaan konsep *fair value* (Apandi, 2014). Auditor memerlukan komponen untuk pekerjaan audit yang lebih luas karena tingkat asumsi subjektif, penilaian, dan estimasi yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan risiko salah saji material, sehingga risiko audit meningkat (Lee et al, 2013). Penerapan konsep *fair value* ini berpengaruh terhadap tanggung jawab dan kompleksitas tugas serta risiko audit yang diemban auditor sehingga dapat menyebabkan peningkatan *fee* audit.

Beberapa perbedaan hasil masih ditemui dalam penelitian mengenai pengaruh *fair value non-current asset* terhadap penetapan *fee* audit. Penelitian (Ettredge et al,2014), (Yao et al,2015) dan (Apandi, 2015) menghasilkan hipotesis bahwa *fair value* memiliki dampak positif terhadap *fee* audit, namun penelitian dari (Goncharov et al,2012) menyatakan sebaliknya bahwa *fair value* berdampak negatif terhadap *fee* audit. Perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya memungkinkan terdapatnya aspek lain yang mempengaruhi pengaruh antara *fair value non-current asset* dengan *fee* audit.

Mekanisme kontrol terhadap laporan keuangan menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi pengaruh antara *fair value non-current asset* dengan *fee* audit. Dewan komisaris merupakan salah satu pihak yang berkemampuan untuk melakukan kontrol terhadap laporan keuangan. Ujiyantho et al, (2007) menyatakan ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Salah satu pihak yang termasuk ke dalam dewan komisaris adalah para pemegang saham.

Pemegang saham dalam sebuah perusahaan dapat terbagi menjadi dua komunitas, yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Hak suara dipengaruhi oleh banyaknya jumlah saham yang dimiliki seorang pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas. Seringkali terjadi *conflict of interest* antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, di mana pemegang saham mayoritas melakukan ekspropriasi kekayaan atas pemegang saham minoritas, atau pemegang saham mayoritas menggunakan kontrol mereka untuk menunjuk manajer dan direksi yang dapat memfasilitasi ekspropriasi yang mereka lakukan (Kim et al,2007).

Keadaan akan berbeda apabila terdapat kepemilikan saham terbesar kedua dalam perusahaan. Pemilik saham terbesar kedua ini juga memiliki andil dalam mengambil keputusan, sehingga dapat mencegah pemilik saham mayoritas untuk mengambil keputusan dengan semena-mena sekaligus menjadi fungsi pengawasan bagi manajemen. Ketika kepemilikan perusahaan publik terkonsentrasi ke tangan beberapa pemegang saham besar, maka para pemegang saham besar ini memiliki

insentif dan kekuatan untuk memantau operasi dan manajemen perusahaan secara efektif (Kim et al., 2007). Maka terjadinya kesalahan ataupun manipulasi pada *fair value non current asset* dapat diminimalisir, sehingga risiko dalam audit berkurang dan akan berpengaruh negatif pada pendapatan *fee* audit.

Kepemilikan terbesar kedua dipilih sebagai variabel moderasi karena masih belum banyak penelitian yang menggunakannya sebagai variabel yang diduga berpengaruh secara *moderating* (memperkuat atau memperlemah) antara *fair value non current asset* berpengaruh dengan *fee* audit. Dalam penelitian Yao et al. (2015) dinyatakan *Good Corporate Governance* dapat mengurangi *fee* audit dalam konteks revaluasi aset. Sementara dalam penelitiannya, Attig et al. (2009) menyatakan bahwa peningkatan angka pada pemegang saham terbesar dapat meningkatkan *corporate governance* sehingga meningkatkan nilai perusahaan pada perusahaan di Asia Timur.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Apandi (2015). Peneliti menggunakan variabel *fair value non current asset* sebagai faktor yang mempengaruhi *fee* audit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menambahkan kepemilikan terbesar kedua sebagai variabel yang berpengaruh secara *moderating* (memperkuat atau memperlemah) antara *fair value non current asset* dengan *fee* audit. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terkecuali sektor keuangan dan perbankan yang memiliki karakteristik laporan keuangan yang berbeda dengan laporan keuangan sektor lain, sehingga tidak dapat dijadikan perbandingan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian yang akan diambil adalah “Pengaruh *Fair Value Non Current Asset* terhadap Penetapan *Fee* Audit dengan Kepemilikan Terbesar Kedua sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Perusahaan Non-keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap pengaruh antara *fair value non current asset* dengan *fee* audit, serta pengaruh *moderating* kepemilikan terbesar kedua antara *fair value non current asset* dengan *fee* audit , maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *fair value non current asset* berpengaruh terhadap *fee* audit?
2. Bagaimana pengaruh *fair value non current asset* terhadap *fee* audit dimoderasi oleh kepemilikan terbesar kedua?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah kajian literatur yang memberikan bukti empiris atas perbedaan penelitian terdahulu mengenai pengaruh *fair value* terhadap *fee* audit, serta memberikan gambaran manfaat dan biaya yang berkaitan dengan penerapan *fair value* dalam perusahaan. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menambah kajian mengenai Kepemilikan Terbesar Kedua di Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian terdapat dua pandangan yang berbeda terhadap pengaruh antara *fair value non current asset* dengan *fee* audit, serta pengaruh *moderating* kepemilikan terbesar kedua antara *fair value non current asset* dengan *fee* audit , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan bahwa *fair value non current asset* berpengaruh terhadap *fee* audit.
2. Membuktikan bahwa pengaruh *fair value non current asset* terhadap *fee* audit diperlemah oleh kepemilikan terbesar kedua.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, menambah pengetahuan, dan dapat menjadi referensi bahan diskusi, serta dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan *fair value non current asset* terhadap *fee* audit dengan kepemilikan terbesar kedua sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pedoman, referensi dan bahan pertimbangan bagi auditor dalam menentukan *fee* audit yang rasional.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi penentu kebijakan-kebijakan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam penentuan perusahaan.

c. Bagi Regulator

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan yang berkaitan dengan *fee* audit.

